



LKJIP

Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah

Tahun 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta seluruh aparat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejarah, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	_____	i
Daftar Isi	_____	iii
BAB I PENDAHULUAN	_____	1
A. Latar Belakang	_____	1
B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	_____	5
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	_____	6
D. Isu Strategis	_____	11
E. Sistematika Pelaporan	_____	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	_____	17
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	_____	18
B. Cascading	_____	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	_____	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	_____	28
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	_____	29
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023	_____	33
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021 - 2026	_____	47
D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata - Rata Capaian Nasional/Prov.Jatim/Kab. Kota Lain	_____	48
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	_____	49
F. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	_____	52
BAB IV PENUTUP	_____	55
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Gresik beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 antara lain :

1. Memberikan informasi yang jelas/transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan hasil evaluasi diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya di tahun selanjutnya;

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Komunikasi dan Informatika disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Gresik yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

“Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian”.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

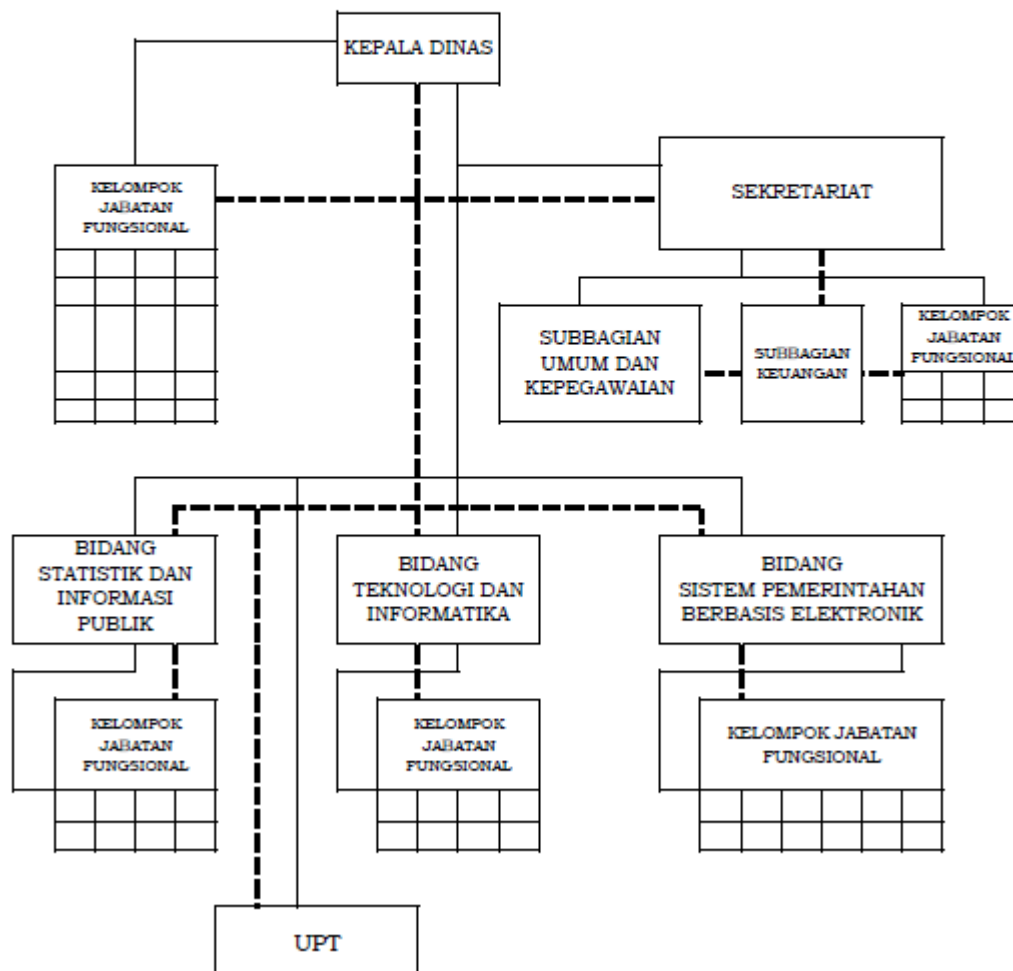
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Perencana Ahli Muda;
- 3. Bidang Statistik dan Informasi Publik, terdiri atas :
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
- 4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - b. Sandiman Ahli Muda;
- 5. Bidang SPBE, terdiri atas :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c. Pranata Komputer Ahli Pertama;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**



4. Personil/Pegawai

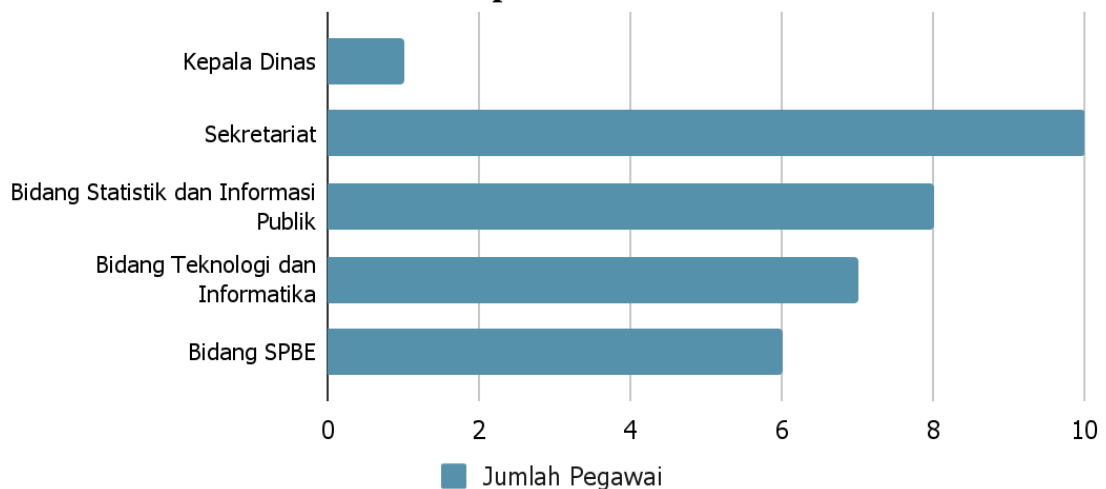
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompeten. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari pegawai struktural dan kelompok jabatan fungsional sebanyak 32 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2024)

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	10
3	Bidang Teknologi dan Informatika	7
4	Bidang Statistik dan Informasi Publik	8
5	Bidang SPBE	6
Total		32

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2024)

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik



Tabel 1.2 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2024)

N O	URAIAN	PENDIDIKAN								JML
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)									
	Juru Muda Tingkat I (I/b)									
	Juru (I/c)									
	Juru Tingkat I (I/d)									
2	Pengatur Muda (II/a)									
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			1						1
	Pengatur (II/c)					6				6
	Pengatur Tingkat I (II/d)									
3	Penata Muda (III/a)						6			6
	Penata Muda Tingkat I (III/b)						5			5
	Penata (III/c)						1			1
	Penata Tingkat I (III/d)						3	2		5
4	Pembina (IV/a)						2	4		6
	Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
	Pembina Utama Muda (IV/c)							1		1
	Pembina Utama Madya (IV/d)									
	Pembina Utama (IV/e)									
	JUMLAH	0	0	1	0	6	17	8		32

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
(per 31 Desember 2024)

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I			
II	4	3	6
III	6	11	17
IV	4	4	8
Jumlah	14	18	32

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor X.700/1583/437.72/2024 Tanggal 26 Juni 2024, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Penerapan pengukuran kinerja dengan realisasi capaian evaluasi kinerja terinformasi melalui aplikasi SIAKRI telah digunakan sebagai salah satu acuan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (*refocusing*) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja. Penerapan dan penggunaan alokasi anggaran sudah difokuskan pada program prioritas yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dan program pendukung output kunci dalam rangka untuk pencapaian akuntabilitas kinerja secara maksimal;
2. Indeks SPBE menjadi indikator kinerja sasaran RPJMD dan indikator kinerja tujuan OPD yang dievaluasi oleh KemenPan RB RI yang hasil evaluasinya disandingkan dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

telah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP);

3. Informasi kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi. Hasil capaian kinerja dapat dilihat dari laporan monev akuntabilitas bulanan tahun 2024 pada website SIAKRI;
4. Menyediakan aplikasi *google drive* untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan penggunaan *file server* agar data terintegrasi/terpusat yang dapat diakses oleh semua pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Telah dilakukan evaluasi kinerja setiap mingguan terhadap permasalahan dan capaian program dan kinerja mingguan yang dilanjutkan dalam evaluasi capaian bulanan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. ISU STRATEGIS

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Permasalahan utama atau isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

a. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE di Kabupaten Gresik berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong

tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Aplikasi-aplikasi di seluruh OPD belum semuanya terintegrasi. Kebijakan SPBE belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi, dalam hal Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE juga belum semuanya diterapkan berdasarkan kebijakan SPBE. Masih banyak layanan Pemkab Gresik yang belum berbasis elektronik dan berjalan sendiri-sendiri (belum terpadu). Sangatlah *urgent* untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik, serta memperkecil kerentanan ekosistem IT. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis FO (*Fiber Optic*) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan tetap dikembangkannya *Gresik Smart City*.

Maka diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan pemanfaatan seluruh usaha penerapan teknologi dapat mengimbangi besarnya sumber daya yang telah dicurahkan. Diperlukan sebuah sistem yang dalam bahasa teknis memiliki tingkat skalabilitas yang tidak terbatas, bukan hanya usaha visualisasi dari data yang ada, melainkan penyusunan solusi lengkap yang dapat menjadi platform akuisisi data sampai diseminasinya, pengolahan *Big-Data* hingga analisisnya, serta menjadi ruang digital kolaboratif bagi seluruh Perangkat Daerah hingga Pimpinan Daerah untuk dapat benar-benar memanfaatkan data dalam tindakan-tindakan pemerintahan. Platform yang dibutuhkan harus mampu menjadi jembatan dari seluruh proses bisnis sehingga memungkinkan penggunaanya untuk melakukan *cross-tabulation* untuk menemukan relasi dari multivariable dari berbagai sumber data terstruktur maupun tidak terstruktur. Platform yang sama juga

harus memanfaatkan penggunaan teknologi informasi geografis sehingga data pemerintahan dapat Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dilihat secara holistik untuk mendukung keputusan yang tepat guna. Pemerintah Kabupaten Gresik juga berharap dengan penyederhanaan tata kelola data ini dapat memberikan wawasan potensi penguatan PAD.

b. Data Center/Ruang Server

Dengan perkembangan teknologi digital 4.0 yang sangat pesat saat ini masyarakat dituntut untuk bergerak lebih cepat, praktis, efisien dan cenderung instan, sehingga Pemerintahan Kabupaten Gresik harus bergerak cepat, praktis, dan efisien. Kabupaten Gresik menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan perubahan yang pesat, artinya sangat dibutuhkan tempat-tempat yang mempunyai fasilitas dengan kelengkapan sistem teknologi digital yang berstandar 4.0. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang menjadi pusat penyimpanan informasi, aplikasi dan data dirasa memerlukan pembaruan mengingat kebutuhan data yang semakin meningkat dan menampung perangkat Teknologi Informasi yang semakin banyak. Dengan pembaruan serta peningkatan kapasitas dan standarisasi ruang server, diharapkan tingkat *availability*-nya naik, server dan *network uptime* meningkat, serta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya dapat termitigasi dengan baik apabila terjadi insiden atau kejadian yang tidak diharapkan demi tercapainya Arsitektur SPBE Nasional yang terpadu dan terintegrasi. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapainya adalah dengan tersedianya Data center yang terstandarisasi dengan tingkat *availability*, *uptime* server, dan perangkat jaringan yang memadai.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan IT

Keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan SPBE perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas di bidang IT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terampil di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menghadapi *digital government* yang membutuhkan transformasi budaya kerja aparatur dan masyarakat.

d. Keamanan Informasi

Di Kabupaten Gresik sedang gencar-gencarnya melakukan penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi. Regulasi tentang keamanan informasi masih belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi sehingga perlu disusun secara bertahap dan menyelaraskan dengan penerapan manajemennya. Selain itu perlu dilakukan juga pembinaan kepada masyarakat khususnya terkait pengetahuan dan teknologi keamanan informasi. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan cara berkoordinasi ke Dinas Kominfo Provinsi atau dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerapan keamanan informasi di Kabupaten Gresik akan lebih optimal jika didukung dengan anggaran yang memadai.

e. Satu Data Kabupaten

Data memegang peranan strategis dalam transformasi digital sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dan kebijakan secara tepat. Koordinasi pengelolaan data melalui forum Satu Data perlu lebih digaungkan lagi ke seluruh pemangku kepentingan. Beberapa kendala dalam mewujudkan satu data antara lain :

- Kesiapan infrastruktur dan manajemen data yang belum memadai;
- Belum dilakukannya integrasi data dan masih terdapat permasalahan ego sektoral yang memungkinkan tersedianya data yang berbeda antar instansi;
- Munculnya keraguan antar instansi untuk berbagi akses data;
- Kurangnya SDM yang mampu mengelola data dengan baik;
- Terdapat beragam referensi dan standar data;
- Pemahaman kebijakan Satu Data belum dipahami secara merata.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi Kepala Daerah melalui program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2045 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 mengalami perubahan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan. Dalam pelaksanaan rencana strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Gresik.

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian **Misi ke-1** yaitu *“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas, maka ditetapkan **Tujuan Ke-1** yaitu, *“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance”* diukur dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-1** sebagai berikut : *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi”* dengan indikator kinerja yang selanjutnya menjadi tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang lebih optimal dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut yang disandingkan dengan target mulai tahun 2021 – 2026 berdasarkan Renstra lama dan Renstra Perubahan :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (sebelum Perubahan Renstra)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Pertumbuhan pengunjung website	5% ~ 445309 dari 424104 viewers	5% ~ 467575 dari 445309 viewers				
2			Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	5% ~ 2541 informasi dari 2.420 informasi	5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi				
3			Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4				
4			Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100% ~ 100 / 100 data	100% ~ 105 / 105 data				
5			Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang di Integrasikan	28.57% (2/7 data)	42.86% (3/7 data)				
6		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan	Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)				
7			Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (sebelum Perubahan Renstra)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
8		sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2				
9			Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2	3				
10			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1				
11			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	3				
12			Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	3				
13			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	2				
14		Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4	4				
15			Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (sebelum Perubahan Renstra)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
16			Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	2				
17			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	2				

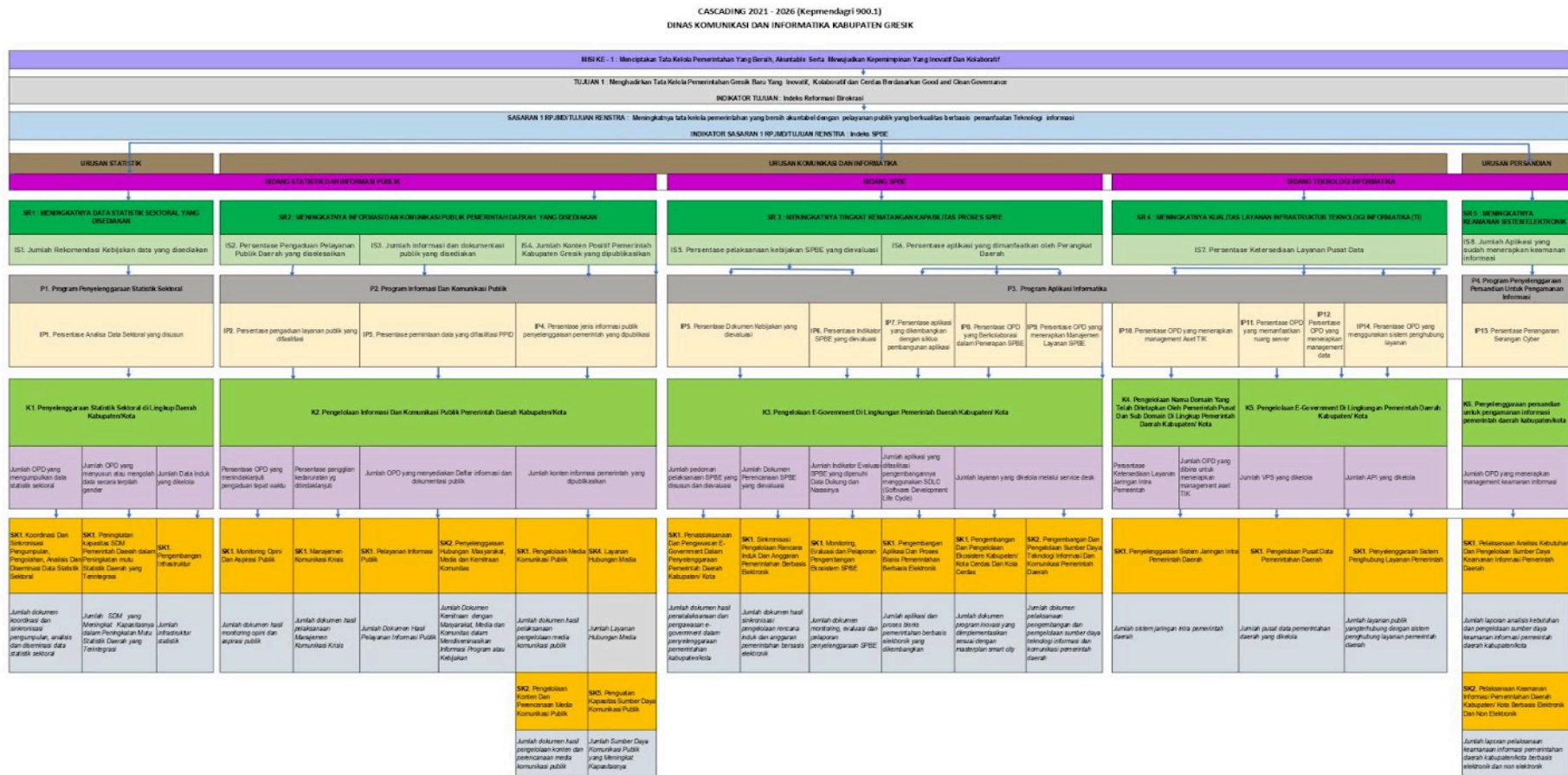
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Perubahan Renstra Kemendagri 050)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik			4	5	5	5
2			2. Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan			10% ~ 55 dari 50 informasi	10% ~ 60 dari 55 informasi	10% ~ 66 dari 60 informasi	10% ~ 73 dari 66 informasi
3			3. Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan			2% ~ 1077 dari 1056 konten edukasi	3% ~ 1110 dari 1077 konten edukasi	4% ~ 1154 dari 1110 konten edukasi	5 % ~ 1212 dari 1154 konten edukasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Perubahan Renstra Kemendagri 050)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4		2. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	1. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI			25%	50%	75%	100%
5		3. Meningkatkan Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE			5	5	5	5
6			2. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE			3	4	4	5
7		4. Meningkatkan Data Statistik Sektoral yang disediakan	1. Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan			2 analisa (50%) ~ 6 dari 4 analisa data sektoral	2 analisa (33%) ~ 8 dari 6 analisa data sektoral	2 analisa (25%) ~ 10 dari 8 analisa data sektoral	2 analisa (20%) ~ 12 dari 10 analisa data sektoral
8		5. Meningkatkan keamanan sistem elektronik	1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi			3	3	4	4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Perubahan Renstra Kemendagri 900.1)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	1. Meningkatkan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan				92.2%	92.3%	92.4%
2			2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan				131	141	151
3			3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan				1810	1820	1830
4		2. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data				80% (7.008 jam dari 8.760 jam)	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)
5		3. Meningkatkan Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi				100%	100%	100%
6			2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah				75%	75%	75%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Perubahan Renstra Kemendagri 900.1)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
7		4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan				4 rekom	4 rekom	4 rekom
8		5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi				30	40	58

B. CASCADING TUJUAN, SASARAN RPJMD DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Gresik guna mewujudkan target kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase Pelaksanaan Kebijakan SPBE yang dievaluasi	100 Persen
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75 Persen
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92.2 Persen
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	131 Informasi
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1810 Konten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	80 Persen
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 Rekomendasi
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	30 Aplikasi

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Gresik sebesar Rp. 24.196.017.389,- terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan;
3. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yang diampuh oleh 2 bidang;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.181.765.933	APBD
2	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 6.271.000.000	APBD
3	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 10.324.663.400	APBD
4	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 1.220.073.056	APBD
5	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian	Rp. 198.515.000	APBD
JUMLAH			Rp. 24.196.017.389	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Gresik tahun 2024. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 < 100%	Sangat Tinggi
2	76 < 90%	Tinggi
3	66 < 75%	Sedang
4	51 < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 secara umum berjalan dengan baik. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.2,

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	100%	100%	Tercapai
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	75%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92.2%	97.1%	105%	Tercapai
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	131 Informasi dan Dokumentasi	213 Informasi dan Dokumentasi	162%	Tercapai
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1810 Konten Positif	3362 Konten Positif	185%	Tercapai
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	80%	90.25%	112%	Tercapai
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%	Tercapai
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	30 Aplikasi	30 Aplikasi	100%	Tercapai

Dari 8 indikator sasaran terdapat 4 indikator yang sesuai dengan target RPJMD 2026 yaitu, Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi, persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah, jumlah rekomendasi kebijakan data yang disediakan dan jumlah aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi. Sedangkan 4 indikator yang sudah melebihi target RPJMD 2026 adalah, persentase pengaduan pelayanan publik daerah yang diselesaikan, jumlah konten positif pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan, jumlah konten positif pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan dan persentase ketersediaan layanan pusat data. Pengukuran realisasi kinerja 2024 dengan target akhir RPJMD akhir 2026 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	100%	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	75%	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92.4%	97.1%	Melebihi dari target Renstra 2021-2026

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	151 informasi dan dokumentasi	213 informasi dan dokumentasi	Melebihi dari target Renstra 2021-2026
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1830 konten positif	3362 Konten positif	Melebihi dari target Renstra 2021-2026
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90%	90.25%	Melebihi dari target Renstra 2021-2026
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekomendasi	4 rekomendasi	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	58 Aplikasi	30 Aplikasi	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2023

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 melalui 5 (Lima) sasaran strategis dan 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditunjang dengan anggaran Belanja. Pagu APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2024 sebesar **Rp 24.196.017.389,00** (Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Pada bulan Maret pagu Diskominfo mengalami pergeseran menjadi sebesar **Rp.24.618.017.389,00** (Dua puluh empat milyar enam ratus delapan belas juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari pertambahan anggaran DBHCHT. Pagu akhir PAPBD tahun 2024 menjadi sebesar **Rp24.656.433.095,00** (Dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh lima Rupiah). Pagu tersebut di atas untuk melaksanakan 5 sasaran, 5 program, 11 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 8 indikator tidak ada mengalami peningkatan/penurunan. Hal ini dikarenakan indikator kinerja tahun 2023 dan indikator kinerja 2024 mengalami perubahan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	-	100%	-
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	-	75%	-
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	-	97.1%	-
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	-	213 informasi dan dokumentasi	-
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	-	3362 Konten positif	-
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	-	90.25%	-
4	Meningkatnya Data Statistik Sektor yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	-	4 Rekomendasi	-
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	-	30 Aplikasi	-

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN
STRATEGIS 1**

Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 1, “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” memiliki 2 indikator kinerja, 1 indikator telah melampaui target dan 1 indikator tidak tercapai. Jika membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dapat dilihat mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2023 ada 1 indikator kinerja tidak tercapai dari 2 indikator, namun tahun 2024 dari 2 indikator dengan 2 indikator yang tercapai sesuai target.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-1 “Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE” adalah sebagai berikut :



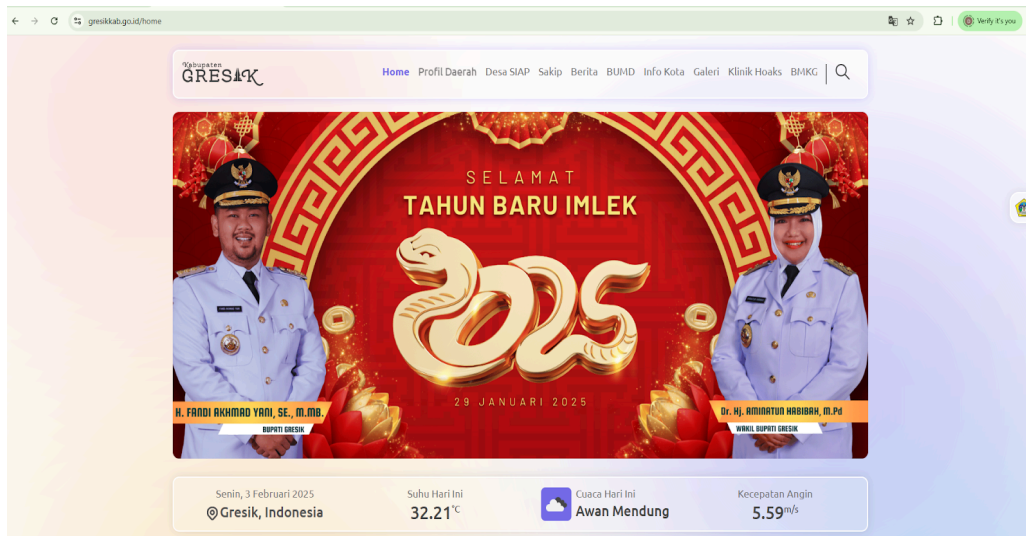
Dokumentasi Sosialisasi Aplikasi Gresikpedia dan Pengaduan SP4N-Lapor



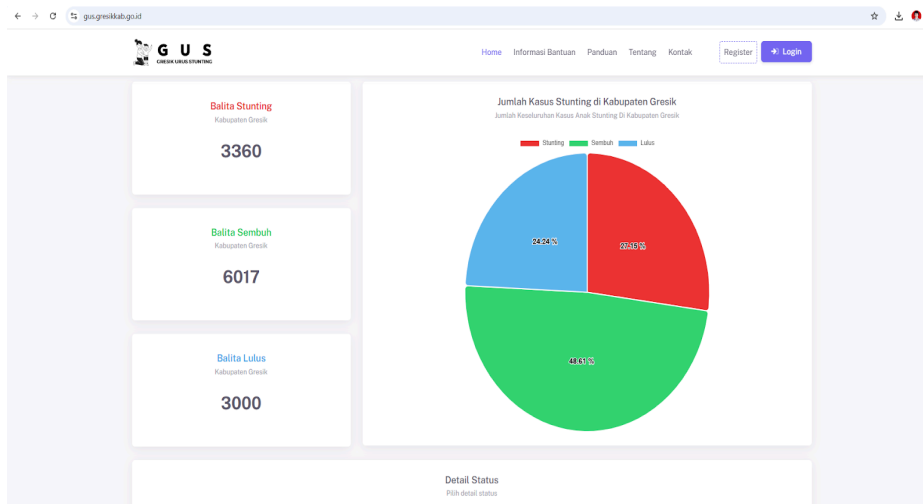
Dokumentasi Evaluasi Penerapan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2024



Dokumentasi Bimbingan Teknis IOP



Tampilan menu website <https://jdih.gresikkab.go.id/>



Tampilan Aplikasi GUS

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan

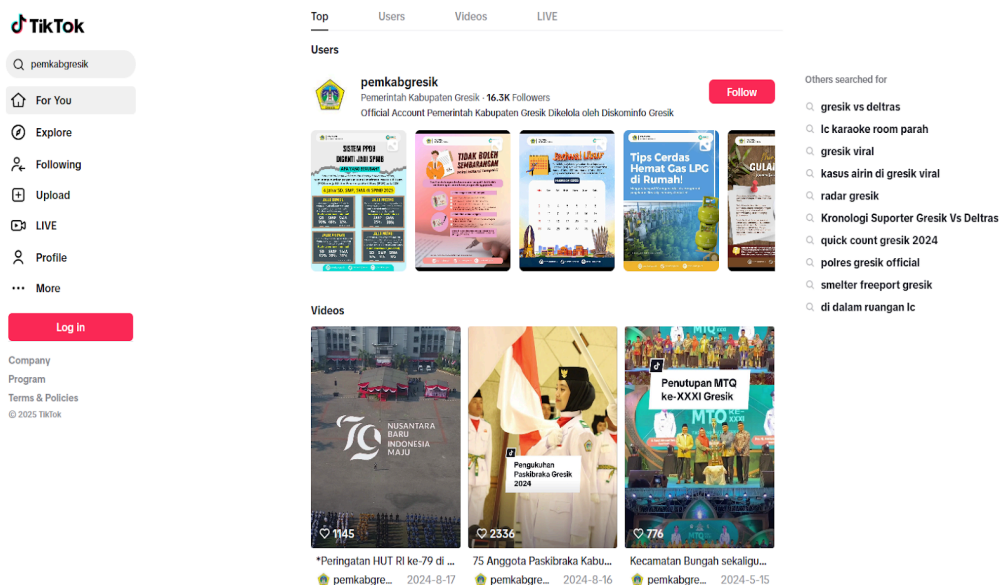
Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 2, “Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan” memiliki 3 indikator kinerja, dengan semua indikator melebihi target.

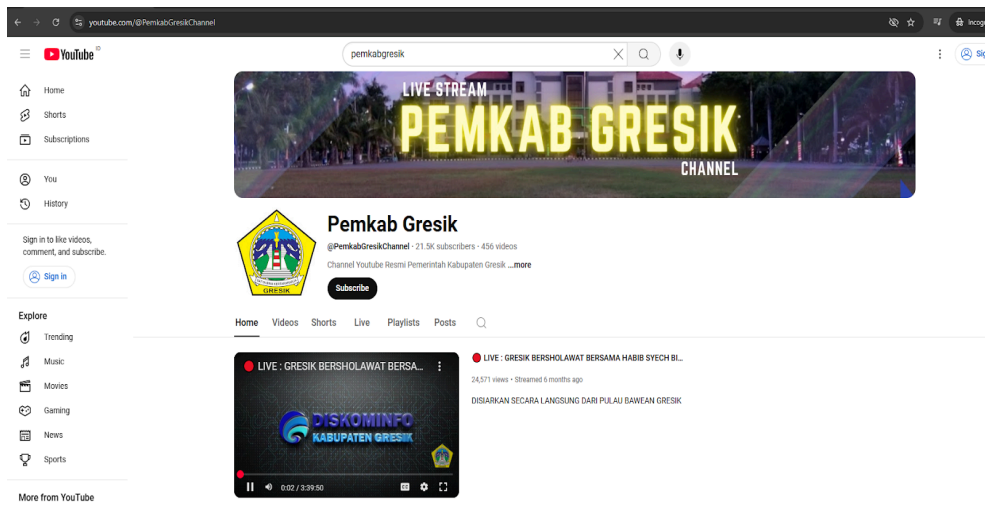
Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mempertahankan capaian 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan”, guna memberikan pelayanan optimal dan efektif bagi masyarakat Gresik pada umumnya.

Saat ini, keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyebarluasan informasi harus lebih dioptimalkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik membentuk satu wadah internal yang diberi nama Gresik News Room, yang bertujuan untuk menjangkau informasi terupdate, serta menyaring berita hoax terkait kegiatan pemerintahan. Saat ini masyarakat, terutama kaum milenial memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id), akun IG @pemkabgresik, @suaragresik, @kominfogresik, Youtube suara gresik, pemkab gresik, akun FB Pemerintah Kabupaten Gresik, Tiktok @pemkabgresik, @suaragresik, @kominfogresik akun X @suaragresik. Kegiatan Talkshow dan podcast dilakukan dengan berbagai narasumber dari OPD/kementerian dan lembaga sekitar.

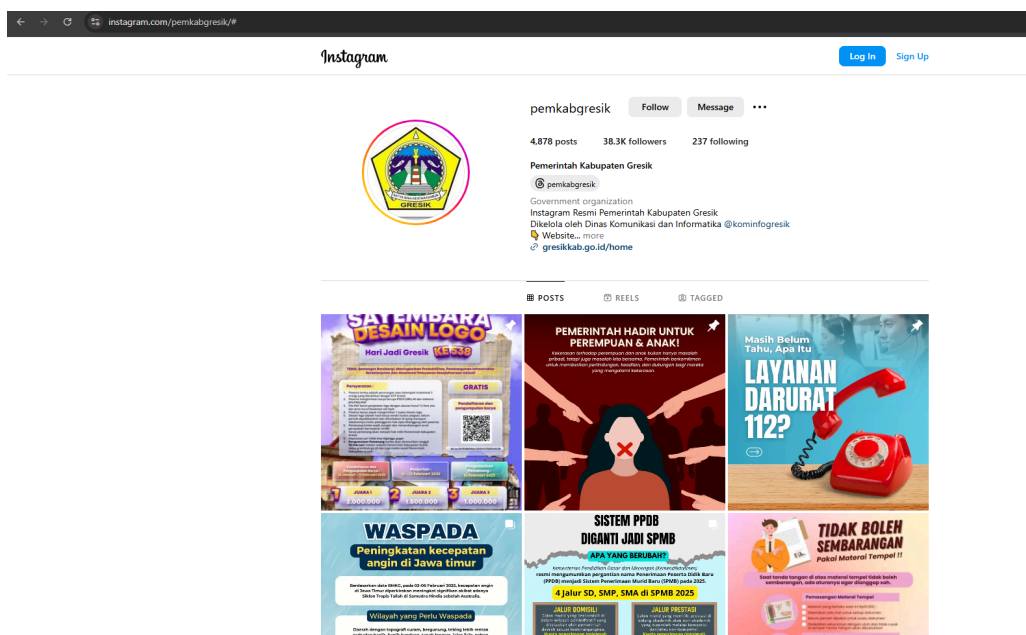
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-2 “Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan” adalah sebagai berikut :



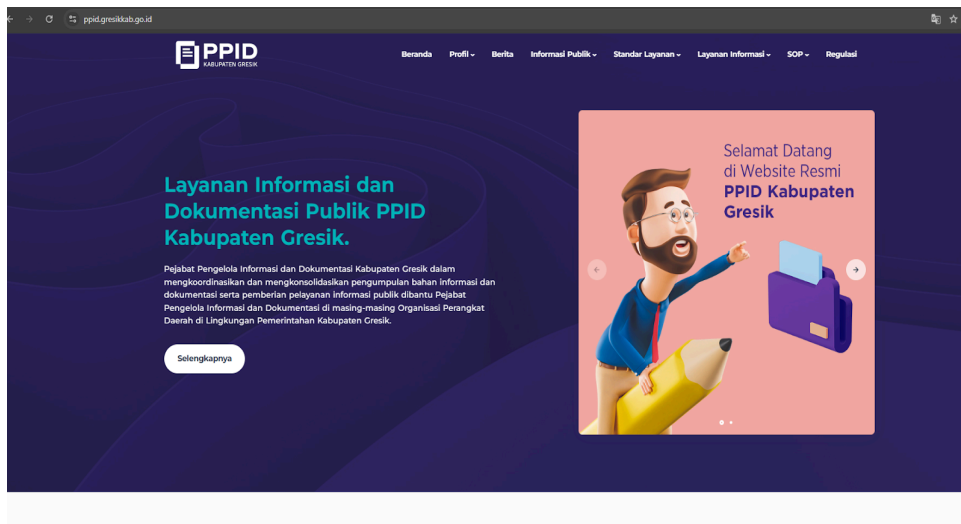
TikTok @pemkabgresik



Youtube pemkab gresik



Instagram @pemkabgresik



Website ppid.gresikkab.go.id

Diskominfo Kabupaten Gresik mempunyai sasaran ‘Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan’ dengan indikator “persentase pengaduan pelayanan publik daerah yang diselesaikan” dengan target tahun 2024 sebesar 92.20% dan terealisasi sebesar 97.1%.

Perbandingan capaian pengaduan pelayanan publik dengan capaian pengaduan pelayanan publik Nasional/Provinsi lain/Kabupaten Lain dapat diilustrasikan dalam tabel 3.6.

Sedangkan 2 indikator sasaran lainnya yaitu jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan dan jumlah konten positif pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan nasional/provinsi.kabupaten lain.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 3, “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” memiliki 1 indikator kinerja, dan tercapai. Tahun 2023 untuk indikator “Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TI” capaian 100%. Di tahun 2024 indikator “Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data” capaian 112% .

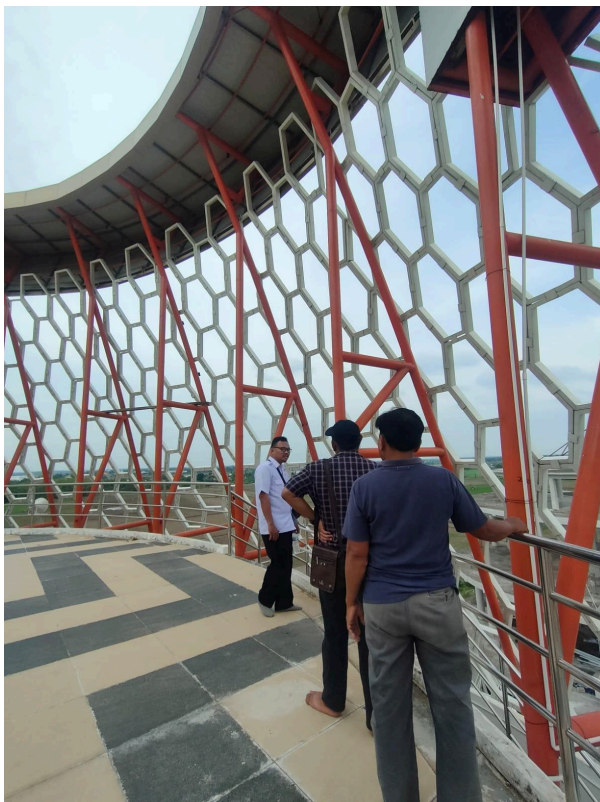
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-3 “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)” adalah sebagai berikut :



Maintenance jaringan intra di BKD



Dokumentasi Kick-off Konsultasi dan Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi



Dokumentasi survey pemasangan CCTV di Islamic Center di Balongpanggang

Sasaran meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI) dengan indikator persentase ketersediaan layanan pusat data tidak memiliki perbandingan capaian kinerja dengan Nasional/Provinsi/Kabupaten lain.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”.

Pada sasaran strategis 4, “Meningkatnya data statistik sektoral yang disediakan” memiliki 1 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-4 “Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan adalah sebagai berikut :



Sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan BPS Kabupaten Gresik dan Diskominfo Provinsi Jawa Timur



Bimbingan teknis aplikasi Gresik Satu Data

Sasaran meningkatnya data statistik sektoral yang disediakan dengan indikator jumlah rekomendasi kebijakan data yang disediakan tidak memiliki perbandingan capaian kinerja dengan Nasional/Provinsi/Kabupaten lain.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”. Pada sasaran strategis 5, “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” memiliki 1 indikator kinerja, dengan semua indikator tercapai.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 guna mencapai sasaran strategis ke-5 “Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik” adalah sebagai berikut :



Sertifikat ISO/IEC 27001:2002 terkait keamanan informasi

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dari 8 indikator sasaran terdapat 4 indikator yang sesuai dengan target Renstra 2021-2026 yaitu, Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi, persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah, jumlah rekomendasi kebijakan data yang disediakan dan jumlah aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi. Sedangkan 4 indikator yang sudah melebihi target Renstra 2021-2026 adalah, persentase pengaduan pelayanan publik daerah yang diselesaikan, jumlah konten positif pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan, jumlah konten positif pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan dan persentase ketersediaan layanan pusat data. Pengukuran realisasi kinerja 2024 dengan target akhir Renstra 2021-2026 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	100%	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	75%	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92.4%	97.1%	Melebihi dari target Renstra 2021-2026
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	151 informasi dan dokumentasi	213 informasi dan dokumentasi	Melebihi dari target Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1830 konten positif	3362 Konten positif	Melebihi dari target Renstra 2021-2026
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	90%	90.25%	Melebihi dari target Renstra 2021-2026
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekomendasi	4 rekomendasi	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	58 Aplikasi	30 Aplikasi	Sesuai dengan target Renstra 2021-2026

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL/PROV. JATIM/KAB.KOTA LAIN

Dari 8 indikator sasaran terdapat 1 indikator yang realisasinya lebih rendah dari realisasi Prov. Jatim/Kab.Kota lain yaitu, persentase pengaduan pelayanan publik daerah yang diselesaikan. Sisanya belum tersedia data pembandingan. Pengukuran capaian kinerja Kab. Gresik dibandingkan dengan capaian kinerja Prov.Jatim/Kab.Kota Lain dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kab.Gresik Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Prov. Jatim/Kab.Kota Lain

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/ Kab. Kota Lain	Kab. Gresik	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
Meningkatnya Tingkat Kematangan	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi		100%	

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Prov. Jatim/ Kab. Kota Lain	Kab. Gresik	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
Kapabilitas Proses SPBE	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		75%	
Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	100% (Prov.Jatim)	97.1%	Lebih rendah dibandingkan Prov. Jatim
	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan		213 informasi dan dokumentasi	
	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan		3362 Konten positif	
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data		90.25%	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Dari kelima sasaran strategis tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyimpulkan analisis keberhasilan/kegagalan beserta solusinya yang dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	– Keberhasilan: Monev program kerja SPBE dilakukan secara berkala – Kegagalan: Belum adanya tindak lanjut dari BPKSDM terkait penyusunan kebijakan manajemen SDM	–Berkoordinasi secara berkala dengan OPD terkait
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah	– Keberhasilan: Adanya pedoman pembangunan/pengembangan aplikasi – Keberhasilan: Adanya monev layanan elektronik – Kegagalan: Perangkat daerah dalam melaksanakan pengembangan/pembangunan aplikasi belum melalui semua tahapan SDLC (Software Development Life Cycle)	–Melakukan sosialisasi pedoman pembangunan/pengembangan aplikasi
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase pengaduan pelayanan publik daerah yang diselesaikan	– Keberhasilan: Aplikasi SP4N-Lapor cenderung lebih stabil	- Evaluasi dan perbaikan kebijakan serta tata kelola pengaduan
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	– Keberhasilan: OPD mulai menyusun DIDP (Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik)	- Melakukan evaluasi monitoring dan evaluasi secara berkala dengan OPD terkait

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	– Keberhasilan: Pemanfaatan monitoring media dan media analitik – Kegagalan: Kurangnya perangkat untuk melakukan liputan	- Berkoordinasi dengan tim terkait penataan jadwal liputan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase ketersediaan layanan pusat data	– Keberhasilan: Dukungan dari PDN sehingga tidak terdapat keterbatasan resource – Kegagalan: Terdapat serangan DDOS pada salah satu aplikasi yang terdapat pada CPanel	- Melakukan bimbingan teknis atau pelatihan terkait keamanan informasi secara berkala
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah rekomendasi kebijakan data yang disediakan	– Keberhasilan: Terdapat tenaga ahli statistik yang bertugas untuk menyusun dokumen rekomendasi dari hasil analisis data	- Penyebarluasan hasil Analisa data sektoral melalui media social Pemkab Gresik
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	– Keberhasilan: Tersedianya tenaga ahli keamanan yang berfokus pada pengecekan website dan aplikasi – Kegagalan: Tenaga ahli keamanan hanya berjumlah 1 orang, sehingga kinerja melambat	- Penyusunan pedoman manajemen keamanan informasi dan penerapan manajemen keamanan informasi

F. EFEKTIVAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka untuk setiap sasaran strategis dapat dianalisis akuntabilitas keuangan yang disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2024, anggaran PAPBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang digunakan untuk mencapai target indikator sasaran strategis/kinerja utama sebesar **Rp 18.386.109.581,-** (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), terealisasi sebesar **Rp 17.463.124.482,-** (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) ekuivalen **94,98%** dengan efisiensi **Rp 922.985.099,-** (Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) ekuivalen dengan **5,02%**.

Capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 120.80% dengan kategori “Sangat Tinggi” dan rata-rata capaian keuangan sebesar 96.16% dengan kategori “Sangat Tinggi” dan efisiensi sebesar 5.02%

Pada tabel 3.8 dapat dilihat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai, sebagai berikut:

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	Rp. 246.705.900	Rp. 236.699.109	95,94%	100%	
		Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Rp. 1.378.294.100	Rp. 1.354.456.822	98,27%	100%	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	Rp. 8.851.422.125	Rp. 8.061.131.262	91,07%	112.81%	
3	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	Rp. 606.756.000	Rp. 105.200.000	99,47%	105.31%	
		Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	Rp. 105.200.000	Rp. 100.866.614	95,88%	162.60%	
		Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	Rp. 5.981.044.000	Rp. 5.955.203.781	99,57%	185.75%	

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI
4	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	Rp. 967.931.181	Rp. 916.324.753	94,67%	100%	
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	Rp. 248.756.275	Rp. 234.909.366	94,43%	100%	
Rata-rata					96.16%	120.80%	5.02%
Kategori					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat realisasi yang telah dicapai, maka secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target, dari 8 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja, ada 8 indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sama dengan atau lebih dari 100% sehingga mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi belanja daerah PAPBD Tahun 2024 sebesar Rp 24.656.433.095,- dan Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 23.565.459.261,- atau 95,58%. Capaian Indeks SPBE sebesar 4,32 dari target sebesar 3,86. Keberhasilan

capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya kerjasama dari semua pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika serta adanya upaya/solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

Plt. BUPATI GRESIK

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

AMINATUN HABIBAH

Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650307 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	1	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100 persen
		2	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75 persen
2	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang Disediakan	1	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah. yang diselesaikan	92.2 persen
		2	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	131 informasi
		3	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1810 Konten
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	1	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	80 persen
4	Meningkatnya Data Statistik Sektorial yang Disediakan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	4 rekomendasi
5	Meningkatnya Keamanan Sistem Elektronik	1	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	30 Aplikasi
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,270,323,514	PAPBD
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 6,693,000,000	PAPBD
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 10,476,422,125	PAPBD
4	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 967,931,181	PAPBD

5	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 248,756,275	PAPBD
Jumlah			Rp. 24,656,433,095	

PIHAK KEDUA
Pit. BUPATI GRESIK



AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Peswt. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

Gresik, 26 Juni 2024

Nomor : 700.04/1593/437.72/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Evaluasi Implementasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik Tahun Anggaran
2023.

Kepada
Yth. Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Gresik
di-
G R E S I K

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT, CGCAE.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN
ANGGARAN 2023 PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN
ANGGARAN 2023 PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

NOMOR : X.700/1583/437.72/2024

TANGGAL : 26 JUNI 2024

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/1327/437.72/2024 Tanggal 7 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang.

	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kedudukan Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah: “ membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.”

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistic dan persandian;

- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Perencana Ahli Muda.
- 3. Bidang Statistik dan Informasi publik, terdiri atas :
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda.
- 4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - b. Sandiman Ahli Muda;
- 5. Bidang SPBE, terdiri atas:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c. Pranata Komputer Ahli pertama;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	9
3	Bidang Teknologi dan Informatika	7
4	Bidang Statistik dan Informasi Publik	9
5	Bidang SPBE	6
	Total	32

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022 melalui Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor : 050/157/437.75/2024 tanggal 1 Februari 2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penerapan pengukuran kinerja dengan realisasi capaian evaluasi kinerja terinformasi melalui aplikasi SLAKRI telah digunakan sebagai salah satu acuan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (*refocusing*) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
Penerapan dan penggunaan alokasi anggaran sudah difokuskan pada program prioritas yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis dan program pendukung output kunci dalam rangka untuk pencapaian akuntabilitas kinerja secara maksimal;
2. Indeks SPBE menjadi indikator kinerja sasaran RPJMD dan indikator kinerja tujuan OPD yang dievaluasi oleh KemenPANRB RI yang hasil evaluasinya dibandingkan dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya telah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP);
3. Informasi kinerja telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi (hasil capaian kinerja dapat dilihat dari laporan monev akuntabilitas bulanan Tahun 2022 pada website

SIAKRI);

4. Menyediakan aplikasi *google drive* untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan penggunaan file server agar data terintegrasi/ terpusat;
5. Telah dilakukan evaluasi kinerja setiap mingguan terhadap permasalahan dan capaian program dan kinerja mingguan yang dilanjutkan dalam evaluasi capaian bulanan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **86,97** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	28,02
b. Pengukuran Kinerja	30%	25,52
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,43
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	86,97

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor: 2612 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, Perjanjian

Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,02** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **93%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor: 2612 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara

berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading kinerja*). Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **8,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **95,83%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, monitoring target jangka menengah dalam Renstra dilakukan secara insidentil, tidak terjadwal tanpa SOP atau mekanisme yang jelas sehingga pencapaiannya monitoringnya tidak sampai dengan tahun berjalan, sedangkan anggaran yang ditetapkan masih belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, sehingga aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **13,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,52** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **85,08%** dengan

kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terdefinisi operasional yang jelas serta mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang andal. Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **91,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Dalam mengukur capaian kinerja pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker), telah dilakukan periodik namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur, mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) dan pengukuran telah dilakukan secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **92,86%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian (recofusing) organisasi, strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, namun belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja karena anggaran yang dibutuhkan belum sesuai dengan sasaran kinerja yang telah memuat outcome dan sesuai dengan kapasitas organisasi, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **11,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Namun, belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*),

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, sesuai standar, dengan

melakukan pendalaman yang memadai dan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar telah menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, ada peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Mempengaruhi terjadinya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup Memadai)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*benchmark* kinerja);
2. Agar informasi dalam laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
3. Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
4. Agar Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dimana perlu ditambahkan *screenshot* rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam pemenuhan dokumen;
5. Agar pengesahan dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Monev Rencana Aksi, Monev renja, Laporan Budaya Kerja) disertakan tanggal bulan dan tahunnya dan telah tertandangani oleh Kepala Dinas.

pemenuhan dokumen.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **87,02** dengan kategori A (**Memuaskan**) yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 26 Juni 2024

Tim Reviu :

1. FATAH HADI, S.Pd., MM
NIP. 19661128 198603 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST.
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U, SE
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA VINKA D, A.Md.
NIP. 20010324 202201 2 001

Lampiran 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024

0	0	0	0	0	0
ST	T	S	R	SR	N/A

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET (SESUAI RPJMD)			REALISASI			2024			NILAI	Perangkat Daerah	Sumber Data
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian			
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi				3-4	3,79	7,38	4.62					Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia				79,42	76.5	77.62	77.98					Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan				11,06	12.42	11.06	10.96					Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS
			Tingkat Pengangguran Terbuka				6,8	8,00	7,84	6,82					Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS



0	0	0	0	0	0
ST	T	S	R	SR	N/A

No	Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TARGET (SESUAI RPJMD)			REALISASI			2024				Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai			
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,01	3,19	3,65	3,31	3,27	4,28	3,86	4,32	111,92%		Dinas Komunikasi dan Informatika	Keputusan Menteri PANRB No.663/2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Dra. NINIK ASRIKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196503021997032003

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET (SESUAI RPJMD)			REALISASI			2024			NILAI	SUMBER DATA	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
70	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	4	4	5	4	2	4					Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
71	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	3	3		3	3						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	1	2	3	3	2	5					Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	1	2		2	2						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
74	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Pertumbuhan pengunjung website	Jumlah pengunjung website pada Tahun (n) - Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1)	persen	5	5		6,97	10,96						Google analytic			
75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n) - Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah informasi yang dipublish pada Tahun (n-1)	persen	5	5	10	28,6	14,33	10					Laporan pertumbuhan informasi publik			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET (SESUAI RPJMD)			REALISASI			2024			NILAI	SUMBER DATA	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	4	4	4	3	4	5					Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
77	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan Tahun n dibagi total data statistik sektoral (dengan target rencana peningkatan 5 % dari Tahun n-1) dikali 100%	persen	100	100		104	112,38						Datagresikkabgoid			
78	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	Jumlah Data Sektoral yang dintegrasikan dibagi Jumlah Seluruh Data Sektoral (7 data) x 100%	persen	28,57	42,86		28,57	42,86						Data warehouse			
79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung jaringan intra pemerintah dibagi Jumlah total perangkat daerah dan kelurahan x 100%	persen	97	97		97,3	97,3						Laporan jaringan			
80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	2	2		2	4						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	2	2		4	3						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	2	3		2	2						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET (SESUAI RPJMD)			REALISASI			2024			NILAI	SUMBER DATA	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	1	1		1	2						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	1	3		1	2						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	2	3		2	3						Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
86	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1 Rintisan 2 Terkelola 3 Terdefinisi 4 Terpadu dan teratur 5 Optimum	tingkat	1	3	3	1	3	3					Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan	Jumlah konten edukasi (Berita, Talkshow, Live Streaming, Event Gresik, dan lain-lain)	persen			2			9								
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah pada Tahun (n) - Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah Informasi Publik pada Tahun (n-1) x 100%	persen			10			46								
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang yang disediakan	Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan	Jumlah Analisa Data Sektoral yang disediakan pada Tahun (n) - Jumlah Analisa Data Sektoral yang disediakan pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah Analisa Data Sektoral yang disediakan pada Tahun (n-1) x 100%	persen			2			4								
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	persen							92,2	97,1	105%		Laporan pengaduan pelayanan publik			

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	Satuan	TARGET (SESUAI RPJMD)			REALISASI			2024			NILAI	SUMBER DATA	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN					
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Informasi							131	213	163%		laporan informasi dan dokumentasi yang disediakan			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan melalui media (media sosial, media elektronik, media siber, media cetak)	konten							1810	3362	186%		laporan konten positif yang dipublikasikan melalui media (medsos, media elektronik, media siber, media cetak)			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	Jumlah Jam yang tersedia layanan pusat data yang aktif dibagi total jam dalam 1 tahun	persen							80	90,25	113%		Laporan ketersediaan layanan pusat data			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	Jumlah pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi dibagi jumlah kebijakan SPBE x 100%	persen							100	100	100%		Laporan evaluasi pelaksanaan SPBE			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah aplikasi yang dikembangkan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi x 100%	persen							75	75	100%		Laporan pelaksanaan aplikasi			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang dihasilkan dari analisa data statistik sektoral	rekomendasi							4	4	100%		Laporan rekomendasi kebijakan dari hasil analisis data statistik sektoral			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan pengujian keamanan	aplikasi							30	30	100%		Laporan pengujian keamanan aplikasi (security and vulnerability scan)			



Lampiran 4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024
Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2024

20	2	0	0	0	0
ST	T	S	R	SR	N/A

URUSAN	URUSAN	PD	K1	K2	K3	K4	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET			REALISASI			2024			NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
											2021	2022	2023	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	Jumlah Pengaduan Yang Difasilitasi (diteruskan, didisposisi, dijawab) Dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk X 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	Jumlah jenis informasi publik yang dipublikasi dibagi total jenis informasi publik (dari 3 jenis informasi data : 1. informasi berkala 2. informasi serta merta 3. informasi tersedia setiap saat) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	Jumlah permintaan data yang difasilitasi PPID dibagi jumlah permintaan data (dari 3 jenis informasi : 1. informasi berkala 2. informasi serta merta 3. informasi tersedia setiap saat) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Jumlah dokumen kebijakan yang dievaluasi / Jumlah dokumen SPBE yang tersedia X 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Jumlah Indiktor SPBE yang dievaluasi dibagi jumlah indikator kematangan spbe	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Jumlah OPD yang berkolaborasi / Jumlah OPD X 100 %	Persen	50	75	100	64	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang dikembangkan dengan Siklus Pembangunan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi dibagi total aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi x 100%	Persen	0	13	33	7	13	33	53	53	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Jumlah OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE /Jumlah OPD yang memiliki Layanan SPBE X 100%	Persen	10	20	30	10	20	65	50	50	100,00%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Ruang Server	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Ruang Server dibagi jumlah OPD di Kab. Gresik x 100%	Persen	25	25	25	25	31	100	27	100	370%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

URUSAN	URUSAN	PD	K1	K2	K3	K4	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET			REALISASI			2024			NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
											2021	2022	2023	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERSANDIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	21	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penanganan Serangan Cyber	Jumlah serangan cyber yang ditangani dibandingkan jumlah serangan cyber yang diterima	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	STATISTIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	20	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	Jumlah data sektoral lingkup OPD yang disusun dibagi jumlah OPD	Persen	7	13	20	7	13	20	27	43	159%		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika,



Lampiran 5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024
Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja 2024		P-APBD 2024			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Selisih (Kolom K-L)		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					24.656.433.095	23.565.459.261	1.090.973.834		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					23.439.745.639	22.456.405.142	983.340.497		
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.270.323.514	6.102.334.779	167.988.735		
2	16	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	13	13	22.942.500	22.641.100	301.400		
2	16	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	12.260.200	11.995.250	264.950		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	10.682.300	10.645.850	36.450		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	Sub Kegiatan	3	3	4.684.170.775	4.627.425.384	56.745.391		
2	16	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	34/12	34/12	4.679.530.695	4.622.795.184	56.735.511		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.720.300	1.713.200	7.100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	2.919.780	2.917.000	2.780		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Sub Kegiatan	7	7	419.107.954	353.751.104	65.356.850		
2	16	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	10.987.464	10.823.500	163.964		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	132.787.675	71.695.000	61.092.675		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	9.997.632	9.811.400	186.232		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	59.282.868	59.278.500	4.368		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	40.123.515	36.851.800	3.271.715		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	1.441.800	1.230.000	211.800		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	164.487.000	164.060.904	426.096		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sub Kegiatan	2	2	14.731.200	14.525.000	206.200		
2	16	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	15	14.731.200	14.525.000	206.200		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jasa	3	3	797.679.085	754.600.317	43.078.768		
2	16	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	206.240.000	167.746.447	38.493.553		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	40.561.085	40.368.700	192.385		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	19	19	550.878.000	546.485.170	4.392.830		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Jenis	2	2	331.692.000	329.391.874	2.300.126		

No Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja 2024		P-APBD 2024			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Selisih (Kolom K-L)		
2	16	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	184.360.000	183.115.552	1.244.448		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	147.332.000	146.276.322	1.055.678		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					6.693.000.000	6.701.783.170	(8.783.170)		
2	16	2	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	Prosentase	100	100	6.693.000.000	6.701.783.170	(8.783.170)		
						Persentase OPD yang menindankanjuti pengaduan tepat waktu	Prosentase	95,6	97,6					
						Jumlah OPD yang menyediakan Daftar Informasi dan dokumentasi publik	Perangkat Daerah	7	12					
						Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	Konten	2005	5701					
2	16	2	201	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	1	42.856.000	39.860.775	2.995.225		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	130.000.000	170.643.721	- 40.643.721		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	793.000.000	789.206.000	3.794.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1	50.000.000	45.893.614	4.106.386		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	1	1	5.000.000.000	4.979.720.085	20.279.915		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	1	563.900.000	563.672.000	228.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	3	58.044.000	57.813.975	230.025		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	201	12	penyelenggaraan hubungan Masyarakat, Media dan Komitran Komunitas	Jumlah Dokumen Kendraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendeseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	1	55.200.000	54.973.000	227.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					10.476.422.125	9.652.287.193	824.134.932		
2	16	3	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Prosentase	90%	93,71%	8.565.071.825	7.799.521.945	765.549.880		
						Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	Perangkat Daerah	10	23					
2	16	3	201	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	8.565.071.825	7.799.521.945	765.549.880		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah VPS yang dikelola	VPS	180	207	1.911.350.300	1.852.765.248	58.585.052		
						Jumlah API yang dikelola	API	18	28					
						Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	Pedoman	2	7					
						Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	Dokumen	2	2					
						Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	Indikator	47	47					
						Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	Aplikasi	8	8					
						Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk	Layanan	31	32					
2	16	3	202	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	7	176.705.900	172.833.582	3.872.318		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja 2024		P-APBD 2024			Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Selisih (Kolom K-L)		
2	16	3	202	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	2	40.000.000	36.156.027	3.843.973		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	202	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	196.442.300	187.404.500	9.037.800		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	202	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	8	8	1.190.000.000	1.174.655.099	15.344.901		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	202	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	10	22	89.908.000	74.204.817	15.703.183		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	202	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	6	6	127.756.100	124.752.291	3.003.809		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	60.538.000	55.049.432	5.488.568		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	5	30.000.000	27.709.500	2.290.500		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					967.931.181,00	874.144.753,00	93.786.428,00		
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					967.931.181	874.144.753	93.786.428		
2	20	2	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpilah gender	Perangkat Daerah	4	4	967.931.181	874.144.753	93.786.428		
						Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	Perangkat Daerah	35	43					
						Jumlah Data Induk yang dikelola	Data	2	2					
2	20	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	147.931.181	127.312.753	20.618.428		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	201	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	2	2	770.000.000	721.240.500	48.759.500		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	201	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan atau Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan atau Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	37	49	50.000.000	25.591.500	24.408.500		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					248.756.275	234.909.366	13.846.909		
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					248.756.275	234.909.366	13.846.909		
2	21	2	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan manajemen keamanan informasi	Perangkat Daerah	6	6	248.756.275	234.909.366	13.846.909		
2	21	2	201	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	9.452.000	9.425.282	26.718		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	201	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	239.304.275	225.484.084	13.820.191		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Dra. NINIK ASTRIKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003